

**PENGEMBANGAN INDUSTRI PETERNAKAN RAKYAT MANDIRI
MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN PEMBERDAYAAN SDM**

(Industry through reinforcement of institution and human power resource)

Syarifuddin Nur, Oentoeng Edy Djatmiko dan Siti Zubaidah

Fakultas Peternakan Unsoed

ABSTRACT

The failure of small scale animal farm industry development was indicated by the decreasing of animal farm number and the high price of their product. This failure has an effect into increasing of unemployment, decreasing of animal protein available and animal population because of the high rate of animal slaughtering and the high cost need to buy animal from other countries. This report was aimed to know the strategy on developing of stand alone small scale animal farm. This study based on literature study, panel discussion and interview. The result showed that the development of human power resource was the factor to decide the first priority in developing stand alone small scale animal farm. In the past the government policy always stussed in provision of capital for animal husbandry bussines developing, so it has never been the main priority.

Key words : developing and reinforcement

PENDAHULUAN

Permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah rapuhnya sendi-sendi ekonomi sebagai akibat berkembangnya industri yang sangat tergantung pada bahan baku impor dan sangat sedikit menyentuh perekonomian masyarakat luas. Kondisi yang menjadikan terkonsentrasinya modal pada sekelompok kecil masyarakat telah menimbulkan kesenjangan yang lebar.

Pada era Orde Baru bukti tersebut tampak jelas, yaitu usaha skala besar yang persentasenya hanya 2.76% akan tetapi menguasai 61.1% PDB. Usaha-usaha skala besar membentangkan sayapnya dari hulu ke hilir. Usaha-usaha skala besar ini tidak memberikan tempat teduh bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, baik sebagai pemasok bahan baku,

komponen industri, maupun mengisi bagian-bagian hilirnya.

Secara umum peran pembangunan peternakan terkait dengan 6 aspek yaitu: 1) sumber pangan hewani penyedia daging, telur dan susu; 2) sebagai sumber pendapatan (cash income); 3) sebagai sumber lapangan kerja; 4) perannya untuk mengentaskan kemiskinan; 5) sebagai penyedia sumber bahan baku industri pangan dan non pangan; 6) pelestarian lingkungan hidup (Dirjen Peternakan., 1998).

Usaha peternakan kecil merupakan salah satu sektor usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat dan menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya. Jumlah peternak kecil sebelum krisis moneter sekitar 5,7 juta rumah tangga. Jumlah ini menurun menjadi tinggal 40 persennya saja.

Salah satu alasan teknis gagalnya usaha peternakan terutama unggas adalah mahalnnya harga pakan formula dari pabrik makanan ternak. Mahalnnya harga pakan ternak adalah akibat tingginya komponen impor pada pakan ternak tersebut. Posisi peternak baik skala kecil maupun menengah tidak lebih dari "buruh pelaksana" bagi peternak besar sebagai "penyedia sarana produksi" mulai dari bibit, makanan, obat-obatan dan peralatan. Hubungan yang dikembangkan oleh peternak besar adalah "patron klient" mereka sesungguhnya mampu mensuplai seluruh kebutuhan masyarakat akan produk peternakan seperti telur, daging dan susu dengan sistem distribusi yang baik. Jadi peranan peternak rakyat hanyalah artifisial atau sekedar menempel saja. Namun demikian jumlah mereka ini sangat banyak dan menghidupi jutaan masyarakat Indonesia. Bagaimana memberdayakan mereka para peternak rakyat (kecil) ini adalah suatu permasalahan. Berbagai kebijakan pemerintah misalnya pembatasan skala usaha dan peranan industri peternakan besar pernah dilakukan, berbagai crass program telah dilakukan di awal-awal tahun 80 an baik melalui IFAD maupun proyek-proyek Bank Dunia, namun demikian kita saksikan bersama bahwa langkah tersebut kurang berhasil guna.

PENDEKATAN SISTEM DALAM PEMBANGUNAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pendekatan sistem merupakan suatu metodologi pemecahan masalah yang dimulai dari identifikasi serangkaian

kebutuhan untuk menghasilkan sistem operasi yang memuaskan.

Berdasarkan lingkup kajian yang meliputi segala aspek manajemen yang mempengaruhi pengembangan industri peternakan rakyat mandiri, maka dalam tulisan ini digunakan pendekatan sistem pada proyek agroindustri sebab karakteristik industri peternakan rakyat merupakan gugus dari berbagai hubungan yang kompleks. Keterkaitan sistemik (*systemic linkage*) merupakan hal yang penting untuk dipelajari dalam mendesain pengembangan industri peternakan rakyat yang mandiri.

Analisis Kebutuhan Masing-masing Aktor

Untuk membangun sebuah struktur industri peternakan rakyat yang mandiri diperlukan beberapa aktor yang berperan. Setiap aktor yang berperan memiliki kebutuhan masing-masing, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Departemen Pertanian cq Dirjen Peternakan
 - Kecukupan protein hewani
 - Peningkatan pendapatan dari sektor peternakan
 - Terciptanya lapangan kerja
 - Tersedianya produk hasil ternak secara kontinyu
 - Distribusi produk peternakan merata diseluruh wilayah Indonesia
2. Peternak Besar dan Industri Makanan Ternak
 - Keuntungan yang memadai
 - Pengembalian atas investasi tinggi
 - Terjaminnya bahan baku
 - Pangsa pasar meningkat

- Tercapainya target produksi
3. Peternak Rakyat
 - Sarana untuk berusaha/bekerja
 - Keuntungan memadai
 - Harga sarana produksi tidak berfluktuasi
 - Harga produk peternakan yang wajar
 - Kemudahan dalam pemasaran produk peternakan
 4. Kelompok Swadaya Masyarakat dan Koperasi
 - Dapat menjadi mitra yang baik bagi peternak
 - Kelancaran dalam penyaluran sarana produksi
 5. Lembaga keuangan
 - Pengembalian kredit lancar
 - Peningkatan jumlah nasabah
 - Penyetoran kredit lunak

Formulasi Permasalahan

Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan peternakan adalah konflik kepentingan antar aktor atau pelaku yang terlibat. Hal ini karena terjadinya ketidak seimbangan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing aktor.

Rangkuman formulasi permasalahan yang dihadapi usaha peternakan rakyat yang menyebabkan kegagalan dalam pembangunan sektor peternakan saat ini adalah:

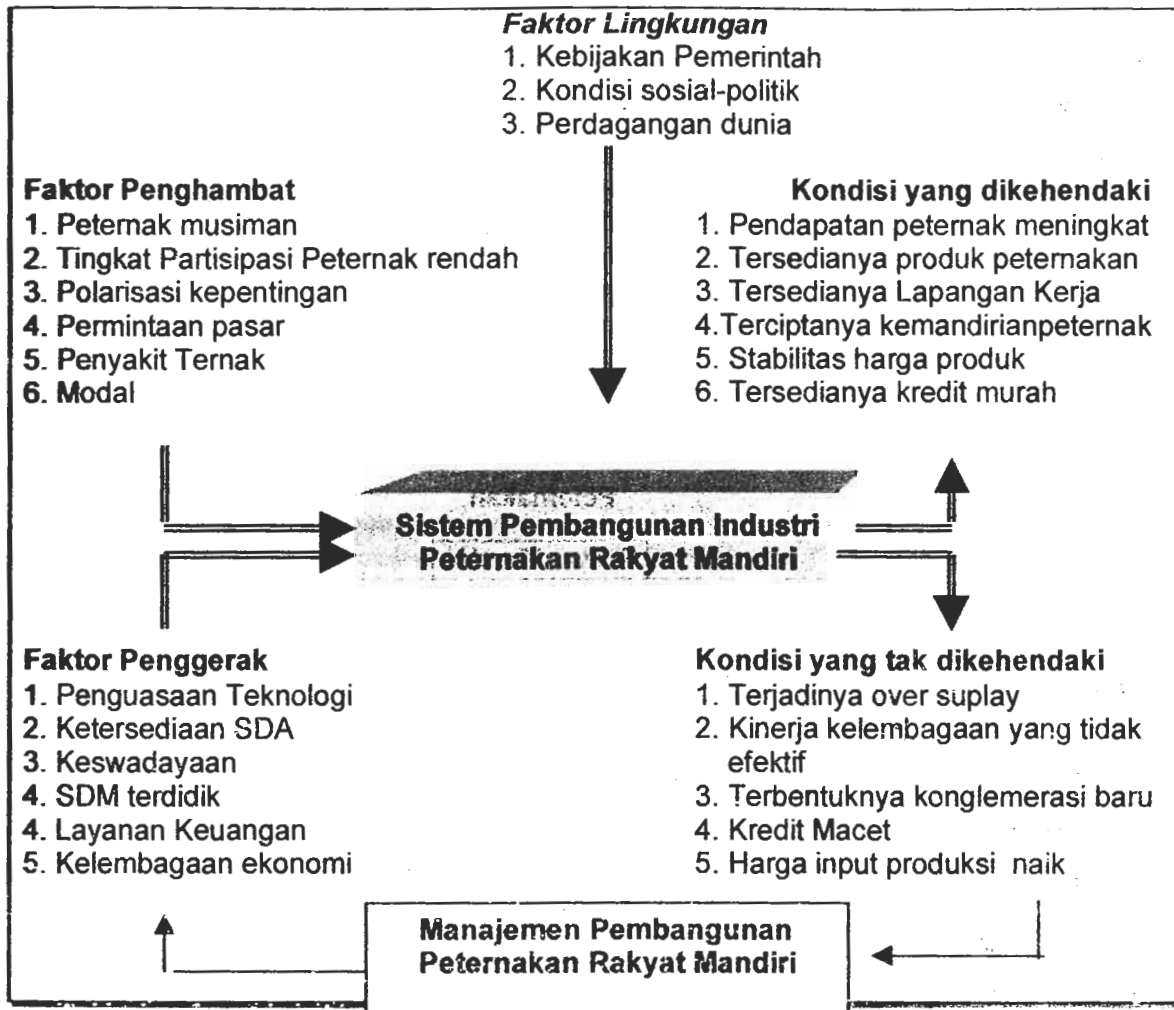
- Mahalnya pakan ternak karena tingginya komponen impor
- Peternak hampir semua membeli pakan formula buatan pabrik

- Teknologi pengolahan pakan belum mampu diadopsi ditingkat peternak
- Harga bibit unggas mahal karena DOC hanya diproduksi oleh peternak besar.
- Posisi tawar peternak kecil terhadap peternak besar sangat lemah
- Peternak besar tidak memiliki good will terhadap peternak kecil (rakyat).
- Keuntungan peternak sangat kecil dengan resiko usaha yang besar
- Kenyamanan berusaha, resiko keamanan

Identifikasi Sistem

Identifikasi sistem merupakan rantai hubungan antara pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan. Pembangunan sektor peternakan memerlukan empat faktor utama dan input-input lingkungan lainnya. Empat faktor ini umum disebut dengan *prime mover* (faktor penggerak). Keempat faktor penggerak tersebut diharapkan dapat menghasilkan kinerja pembangunan yang optimal.

Dalam identifikasi sistem ini selain faktor penggerak terdapat juga faktor penghambat serta kemungkinan adanya output yang tidak dikehendaki. Diagram Manajemen pembangunan usaha peternakan rakyat disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Diagram Pembangunan Usaha Peternakan Rakyat

APLIKASI PHA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM SEKTOR PETERNAKAN

Proses Hirarki Analitik (PHA) merupakan model yang luwes yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya (Saaty, 1993).

Terdapat 3 prinsip dasar dari proses hirarki analitik yang dikemukakan oleh (Saaty, 1993) yaitu:

1. Menggambarkan dan menguraikan hirarki yang disebut menyusun secara hirarki, yaitu memecah-mecahkan persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah-pisah.
2. Pembedaan prioritas dan sin-tesis yang disebut penetaan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen me-nurut tingkat kepentingannya.
3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan

Proses Penilaian Komparasi Hirarki

Penilaian kriteria pada hirarki tersebut dilakukan oleh pihak atau aktor yang berperan dalam perencanaan pembangunan peternakan. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam suatu hirarki keputusan. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan komponen-komponen secara berpasangan dengan nilai yang merupakan skala komparasi yang dikeluarkan oleh Saaty (1993). Dengan menggunakan paket program *Expert Choice (EC)* versi 8.0, diperoleh bobot dan prioritas masing-masing kriteria (faktor) pada Tabel 1.

Tabel 1. menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak merupakan kriteria (faktor) yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan peternakan rakyat. Kesejahteraan peternak yang dimaksud disini adalah : terpenuhinya konsumsi energi protein (KEP), tingkat kesehatan yang memadai, tingkat pendidikan yang memadai, tingkat pendapatan yang cukup, dan rasa keamanan.

Penentuan Prioritas Alternatif Kebijakan

Pembangunan Usaha peternakan rakyat yang mandiri, memerlukan strategi kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan para aktor yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yang strategis untuk menetapkan alternatif kebijakan dari masing-masing kriteria dengan menggunakan pendekatan sistem melalui Proses Hirarki Analitik (PHA).

Dari studi pustaka dan diskusi langsung dengan beberapa pakar dan orang-orang yang memiliki kaitan dengan permasalahan peternakan (Kepala seksi Barbang dan Bagian Perencanaan Dirjen Peternakan, Peternak ayam, dan staf pengajar Fakultas Peternakan Unsoed) dapat dirumuskan lima alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan untuk dikaji melalui analisis ini. Hasil analisis menggambarkan urutan prioritas kebijakan strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan usaha peternakan rakyat. Selengkapnya hasil analisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 dapat dilihat bahwa pengembangan sumberdaya manusia

Tabel 1. Bobot dan Prioritas Kriteria dalam Pengembangan Industri Peternakan Rakyat

No.	Kriteria (Faktor)	Bobot	Prioritas
1	Kesejahteraan Peternak	0.187	I
2	Tingkat Keuntungan	0.274	II
3	Penguasaan Teknologi	0.187	III
4	Keswadayaan Peternak	0.096	IV
5	Layanan Keuangan	0.076	V
6	Ketersediaan Sumberdaya Alam (SDA)	0.056	VI

Tabel 2. Bobot dan Prioritas Alternatif dalam Pengembangan Peternakan Rakyat Mandiri

Alternatif	Bobot	Prioritas
Pengembangan Sumberdaya Manusia	0.238	I
Pembentukan Lembaga Ekonomi	0.211	II
Pengembangan Teknologi	0.197	III
Penyediaan Sarana/prasarana permodalan	0.180	IV
Pengembangan Pola Kemitraan	0.153	V

merupakan prioritas pertama yang harus diperhatikan dalam pembangunan usaha peternakan rakyat mandiri.

Pengembangan sumberdaya manusia yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan peternak dengan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mengembangkan usahanya yang didasarkan atas kehendak meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan (*income generating*). Bentuk kegiatan ini dapat berupa: pelatihan, sekolah lapang, dan magang. Pengembangan SDM ini bertujuan agar peternak dapat mengakses dirinya dengan berbagai hal yang penting dalam rangka pengembangan usahanya, antara lain: sumberdaya alam (agro input), sumberdaya teknologi, permodalan, dan pasar.

Pengembangan dan peningkatan kinerja sumberdaya manusia ditempuh melalui empat wacana, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran dan percaya diri (*awareness and self-confidence development*).
2. Peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan (*income generating ability development*).

3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi

4. (*welfare development*)

5. Peningkatan kesejahteraan sosial - budaya (*social and culture development*).

Melalui pengembangan empat wacana ini diharapkan dapat dihasilkan SDM yang berkualitas dengan ciri-ciri sebagai berikut: produktif, kreatif, efisien, mandiri, memiliki daya saing yang tinggi serta mampu menyongsong era fair trade dengan penuh percaya diri.

Prioritas kedua adalah Pembentukan dan Pengembangan lembaga ekonomi yang mengorganisir kelompok usaha peternakan rakyat. Kelompok ini merupakan unit usaha berazaskan prinsip-prinsip ekonomi tanpa melupakan sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat.

Lembaga donor internasional banyak memberikan perhatian pada pengembangan kelembagaan, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan merupakan titik kritik (*critical point*) dalam seluruh proses pembangunan. Apabila lembaga didefinisikan sebagai "*An institution is collective action in control, liberation,*

and expansion of individual action" (North, 1991). "Institution are set of *ordered relationships among people with define their rights, exposure to the rights of others, previlages, and responsibilities*" (Schmid, 1987). Maka peranan utama kelembagaan dalam hal ini adalah untuk mengurangi ketidak-tentuan dengan menentukan struktur yang stabil bagi interaksi diantara para peternak dapat berarti pula suatu proses menuju ke arah perbaikan aturan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan usaha peternakan rakyat.

Fungsi kelembagaan disesuaikan dengan tujuan bersama dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bersama tanpa melupakan azas-azasnya. Secara lebih spesifik tujuan pembentukan kelembagaan adalah sebagai berikut : (1) sebagai wahana akses secara adil terhadap input faktor, (2) mampu memberikan aturan main dan acuan secara adil bagi setiap pelaku dalam untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam dalam pengalokasian sumberdaya kepada semua unsur yang terlibat, (3) mampu medistribusikan hasil proses-proses pemanfaatan sumberdaya secara adil untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Secara ringkas pembentukan kelembagaan ini adalah untuk memberikan peranan yang lebih besar dan seimbang bagi semua unsur.

Pembentukan kelembagaan ini berbasis pada kelompok-kelompok usaha yang didasarkan pada kedekatan wilayah maupun atas dasar kesamaan jenis dan skala usaha. Pembentukan kelembagaan ini memerlukan input-input antara lain : 1) partisipasi para peternak rakyat, 2)

good will dari para pelaku yang terlibat dalam usaha peternakan (industri pakan ternak, *breeder*, importir dll), 3) kebijakan-kebijakan yang mendukung bagi terbentuknya kelembagaan yang akan mewadahi para peternak rakyat, 4) dukungan dan layanan permodalan untuk menunjang kinerja pembentukan kelembagaan ini. Ketersediaan faktor-faktor input ini melalui proses dalam kelembagaan akan menghasilkan out put antara lain : 1) meningkatnya posisi tawar para peternak secara kolektif, 2)meningkatnya jumlah sumberdaya manusia terdidik, 3) meningkatnya ketersediaan layanan permodalan, 4) terjaminnya ketersediaan sarana produksi, 5) meningkatnya penguasaan teknologi dan 6) terjaminnya stabilitas harga produk.

Hasil kinerja kelembagaan ini secara langsung maupun tidak langsung akan merupakan input bagi proses produksi dalam industri peternakan rakyat secara individual maupun secara agregat.

IV. PENUTUP

Suatu hal yang menarik adalah bahwa pengembangan Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang merupakan prioritas dalam rangka pembangunan peternakan rakyat mandiri. Kesimpulan ini menjadi fenomena baru karena di masa yang lalu pembangunan SDM tidak pernah menjadi prioritas utama. Kebijakan di masa lalu selalu menekankan pada pentingnya permodalan bagi pengembangan usaha peternakan.

Prioritas kedua adalah perlunya pembentukan kelembagaan yang mewadahi seluruh kegiatan usaha peternakan yang berazaskan prinsip-prinsip ekonomi. Pembentukan kelembagaan ini berbasis pada kelompok-kelompok usaha yang didasarkan pada kedekatan wilayah maupun atas dasar kesamaan jenis dan skala usaha. Lembaga ini diperlukan karena berpijak pada pengalaman di masa lalu bahwa besarnya jumlah peternak tanpa organisasi akan menempatkan peternak kecil seperti buruh lepas yang harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan usaha para peternak besar. Pembentukan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar peternak.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan peternakan hendaknya menggunakan pendekatan prioritas dalam sebuah kajian sistem yang melibatkan seluruh aktor yang terkait agar dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama dan dapat mengakuisisi seluruh kepentingan dari aktor yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Peternakan, 1998. Reformasi Pembangunan Sub sektor Peternakan. Disampaikan pada Pekan Kegiatan Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia tanggal 8 September 1998 di Padang.
- _____, 1998. Laporan Bulanan, Bulan Desember 1998. Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta
- North, D.C., 1991. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
- Nurini. 1984. Analisa Tataniaga Ayam Ras Pedaging Peternak Anggota Koperasi di Wilayah Jakarta Selatan. Karya Ilmiah. Fakultas Peternakan IPB, Bogor
- Saaty, T.L., and L.G. Vargas. 1993. Decision Making in Economic, Political, Social and Technological Environments. University of Pittsburgh. USA
- Schmid, A.A., 1987. Property, Power, and Public Choice. An Inquiry into Law and Economics. Preeger, New York.